

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI.
- Badruzaman, M. D. (1994). *Kompendium Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Harsono, B. (2007). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Hutagalung, A. S. (2017). *Hukum Pertanahan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Moegni Djojodirdjo. (1976), *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Santoso, U. (2018). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana.
- Soedharyo Soimin, 2004, *Status Hak & Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunggono, B. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

JURNAL

- Aisyah, A., Susmiyati, H., & Al-Hidayah, R. (2020). Implementasi asas sederhana pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam menjamin hak keperdataan. *Petitum*, 8(2), 131–142. <https://doi.org/10.36090/jh.v8i2.813>
- Amaliyah, A., Ma'ruf, M., Sary, N., & Bitu, S. (2021). Reforma agraria dan penanganan sengketa tanah. *Hermeneutika Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4892>

- Anggraeni, S., & Marwanto, M. (2020). Kewenangan dan tanggung jawab hukum pejabat pembuat akta tanah dalam pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan secara elektronik. *Acta Comitas*, 5(2), 261. <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i02.p05>
- Anjasari, S. (2024). *Analisis Terhadap Penerbitan Sertipikat Ganda (Overlapping) SHM No. 15 dengan SHGB No. 2663 Berdasarkan Asas Kepastian Hukum* (Tesis Magister, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Ariansyah, M. D., & Anggriani, R. (2022). Sengketa Sertipikat Ganda Akibat Perbuatan Melawan Hukum. *Media of Law and Sharia*, 4(1), 1-13
- Cholifa, D. (2024). *Problematika Kepemilikan Hak Atas Tanah Dan Kewenangan Pengawasan Kantor Pertanahan Terhadap Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 2021* (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara Surabaya)
- Deviantari, U., & Djurdjani, D. (2023). Literature review: pengaruh administrasi pertanahan dalam penilaian tanah. *Geoid*, 18(2), 265. <https://doi.org/10.12962/j24423998.v18i2.11342>
- Dewandaru, P. A., Hastuti, N. T., & Wisnaeni, F. (2020). Penyelesaian sengketa tanah terhadap sertipikat ganda di badan pertanahan nasional. *Notarius*, 13(1), 154-169.
- Endriana, M. S., & Ispriyarso, B. (2022). Balik nama sertipikat hak milik atas tanah dalam jual beli tanah di kantor pertanahan nasional kabupaten batang. *Notarius*, 15(1), 204-219. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46035>
- Ginting, D. (2016). Land Registration In Information Technology Perspective A Basis Of Basic Agrarian Law In Indonesia. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 5(5), 184-186.
- Indah, S. (2020). Perbuatan melanggar hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1). <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>
- Ivan, C. (2018). Implikasi hukum dihapuskannya surat keterangan tanah dalam sistem pendaftaran tanah pertama kali. *Perspektif*, 23(1), 25. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v23i1.683>

- Krismantoro, D. (2022). Sejarah dan perkembangan hukum agraria di indonesia dalam memberikan keadilan bagi masyarakat. *IJD-Demos*, 4(2). <https://doi.org/10.37950/ijjd.v4i2.287>
- Masriani, Y. T. (2022). Pentingnya kepemilikan sertipikat tanah melalui pendaftaran tanah sebagai bukti hak. *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 539–552. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5777>
- Murni, C. S., Kelen, B. B., & Sulaiman, S. (2022). The legal certainty of land ownership right in registration's context. *International Journal of Law Reconstruction*, 6(1), 13.
- Nasir, S. M. (2024). Tanggung jawab badan pertanahan nasional dalam penyelesaian sertipikat tanah ganda di Kabupaten Gorontalo. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(11), 1106–1116.
- Parmono, A., & Rachmati, A. (2024). Implementasi program PTSL sebagai solusi efektif dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Jember. *Journal of Indonesian Social Society (JISS)*, 2(2), 100–106. <https://doi.org/10.59435/jiss.v2i2.253>
- Putra, N., & Alfarisi, S. (2022). Jaminan hukum terkait pencatatan sertipikat kepemilikan tanah. *PATRIJLL*, 1(1), 48–61. <https://doi.org/10.61715/jlexlectio.v1i1.16>
- Putri, D., Anwary, I., & Qamariyanti, Y. (2023). Pendaftaran tanah secara sistematis di Kabupaten Kotawaringin Timur. *Notary Law Journal*, 2(4), 303–321. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v2i4.52>
- Rahmawati, P., Arbi, S. R., & Nuralify, M. (2025). Perbuatan Melawan Hukum atas Penguasaan Hak Milik Tanah pada Sertifikat Ganda. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).
- Rejekiningsih, T. (2016). Asas fungsi sosial hak atas tanah pada negara hukum (suatu tinjauan dari teori, yuridis dan penerapannya di Indonesia). *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8744>
- Risnarto. (2021). Transformasi digital dalam pelayanan pertanahan. *Jurnal Bhumi*, 7(1), 48–63.

- Rizqi, A. A. (2018). Perlindungan Hukum Pemilik Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Hal Terjadi Kesalahan Data Penerbitannya (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kota Semarang). 11(2), 141–145.
- Saluling, D. D. (2022). *Penerbitan Sertipikat Ganda Hak Atas Tanah Pada Masa Pemblokiran di Badan Pertanahan Nasional Kota Manado* (Tesis Magister, Universitas Hasanuddin).
- Silaban, B., Tuasalamony, R., Afriyanti, S., Sahupala, D., Rahayaan, L., Wakang, F. & Nunumete, F. (2023). Sosialisasi pendaftaran tanah sebagai upaya meminimalisir konflik pertanahan di Negeri Tulehu. *Pattimura Mengabdi*, 1(4), 179–185. <https://doi.org/10.30598/pattimura-mengabdi.1.4.179-185>
- Siregar, D., Mahasari, J., Mendrofa, S., Gea, H., Zai, C., Lubis, M., ... & Ndruru, H. (2024). Penyuluhan hukum: tentang pentingnya sertipikat tanah. *Jurnal Aplikasi dan Inovasi Ipteks Soliditas (J-Solid)*, 7(1), 98. <https://doi.org/10.31328/js.v7i1.5239>
- Sudrajat, C., Suriaatmadja, T. T., & Jamilah, L. (2023). Problems with complete systematic land registration regulations perspective of legal certainty. *Journal La Sociale*, 4(1), 8–19. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v4i1.753>
- Sutedi, A. (2019). Optimalisasi peran ATR/BPN dalam penyelesaian sengketa pertanahan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 41(3), 385–404.
- Wardhani, S. N. (2018). Kekuatan Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah. 21(1), 61–85
- Wirakusuma, F. A., Toni, F., & Suwartika, R. (2021). Model sistem informasi monitoring berkas kepemilikan tanah berbasis web pada Badan Pertanahan Nasional. *JUTISI: Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 10(3), 567. <https://doi.org/10.35889/jutisi.v10i3.726>
- Wirawan, V. (2023). Agrarian development in Indonesia: Post-reformation legal and sociological perspectives. *Journal of Advanced Zoology*, 44(3), 635–642. <https://doi.org/10.17762/jaz.v44i3.959>

PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia. (1960). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Republik Indonesia. (1991). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 58.

Republik Indonesia. (1997). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.

Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.

Republik Indonesia. (2015). Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 30.

